

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**RAHAYU FITRAHTUL JUNAIDI
88748 / 2007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

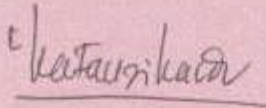
**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* (GG) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
KOTA PARIAMAN**

NAMA : RAHAYU FITRAHTUL JUNAIDI
BP/NIM : 2007/88748
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2012

Disetujui Oleh :

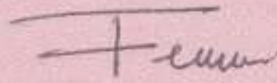
Pembimbing I,



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 19710522 200003 2 001

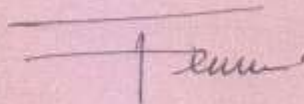
Pembimbing II,



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi-Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA
PARIAMAN

Nama : RAHAYU FITRAHTUL JUNAIDI

BP/NIM : 2007/88748

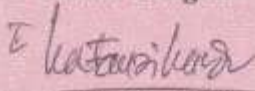
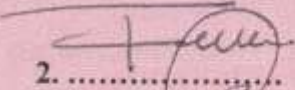
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 15 FEBRUARI 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Henri Agustin SE, M.Sc, Ak	4. 

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahayu Fitrahtul Junaidi
NIM/Tahun Masuk : 88748/2007
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/ 03 Mei 1989
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Syech Moh.Djamil Jambek No.4 Pariaman Selatan
No.HP/Telepon : 085263573963
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/Skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2012

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

0E0ABAAF840223367

6000



DJP

Rahayu Fitrahtul Junaidi
88748/2007

ABSTRAK

Rahayu Fitrahtul Junaidi (2007/88748) Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, MSi, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dan 2) pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada pemerintahan Kota Pariaman.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Total sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 17.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,471 < 1,672$ ($\text{sig } 0,640 > \alpha \text{ } 0,05$) yang berarti H_1 ditolak, dan 2) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,069 > 1,672$ ($\text{sig } 0,000 < \alpha \text{ } 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi instansi pemerintah, sebaiknya harus lebih *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dapat tercapai dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. 2) untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Teristimewa kedua Orang tua beserta Adik-adik dan Seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Rekan-rekan di Fakultas Ekonomi angkatan 2007 dan soulyoe_viemate yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	12
1. Laporan Keuangan Pemerintah	12
a. Pengertian Laporan Keuangan	12
b. Tujuan Laporan Keuangan	13
c. Komponen Laporan Keuangan	16
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	16
2. <i>Agency Theory</i>	21

	13
3. <i>Good Governance</i>	22
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	23
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	25
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	31
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	31
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	32
c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern.....	33
B. Penelitian Relevan	37
C. Pengembangan Hipotesis	39
D. Kerangka Konseptual	42
E. Hipotesis Penelitian	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi Dan Sampel	46
C. Jenis Dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Variabel Penelitian	49
F. Pengukuran Variabel.....	50
G. Instrumen Penelitian	51
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	52
I. Hasil Uji Coba Instrumen	54
J. Model dan Teknik Analisis Data.....	55
K. Definisi Operasional	59

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
B. Demografi Responden.....	63
C. Uji Instrumen Penelitian	73
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	75
E. Uji Model Penelitian	79
F. Uji Hipotesis	83
G. Pembahasan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	95
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Pariaman.....	47
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat.....	51
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	52
4. Nilai Cronbach's Alpha & Corrected Item Total Correlation.....	55
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	62
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	63
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian yang ditempuh	64
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	66
10. Statistik Deskriptif	67
11. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Good Governance	68
12. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	70
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	72
14. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil.....	73
15. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian.....	74
16. Uji Normalitas Residual.....	76
17. Uji Multikolinearitas	77
18. Uji Heteroskedastisitas.....	78
19. Uji F Statistik.....	79

20. Koefisien Determinasi (R^2).....	80
21. Koefisien Regresi Berganda.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	96
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test	101
3. Hasi Uji Validitas dan Realibitas Data Penelitian.....	106
4. Statistik Deskriptif.....	111
5. Uji Asumsi Klasik.....	111
6. Uji Multikolinearitas.....	112
7. Uji Heterokedastisitas	112
8. Uji Hipotesis	112
9. Uji Koefisien Determinasi.....	113
10. Uji Regresi Berganda.....	113
11. Surat Izin Penelitian	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terusnya bergulir reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. sehingga, *good governance* dapat dicapai.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan per-

tanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Informasi keuangan yang berguna sebagai alat untuk pengambilan keputusan tersebut harus berkualitas. Menurut SFAC no.2, laporan keuangan tersebut apabila informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut andal, benar, akurat dan bebas dari pengaruh. Laporan keuangan yang berkualitas itu bebas dari kecurangan, salah bentuk kecurangannya itu adalah korupsi, karena jika terjadi korupsi maka pencapaian laporan keuangan tidak akan berkualitas, efektif dan efisien seperti yang diinginkan.

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, dan sumber pemborosan negara. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan pihak-pihak terkait yaitu prinsipal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Ada kemungkinan laporan keuangan yang dibuat oleh kepala SKPD (Agen) dimanipulasi ketika dilaporkan kepada DPR (prinsipal) untuk menjamin para Kepala SKPD melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat .

Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *good governance* (kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman. pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. Oleh karena itu dapat dikatakan *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu pertama, pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional (modul *good governance*, 2006:12)

Dalam pemerintahan daerah, penciptaan *good governance* merupakan tuntutan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan pemerintah yang kuat, pasar yang kompetitif, dan *civil society* yang mandiri. Sebagaimana kita ketahui, tiga prinsip dasar dalam *good governance* selalu harus diperhatikan, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan publik, sedangkan transparansi merupakan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan.

Good Governance bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan *civil society* yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka dalam implementasi *good governance* diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi. Abdul (2002) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan oleh masyarakat, implementasi finansial audit dan *value for money* audit serta peran auditor eksternal. Tajuddin (2008) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *good governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen.

Faktanya yang kita lihat implementasi dari undang-undang masih kurang serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Masyarakat belum dapat mengakses secara cepat dan mudah semua informasi yang mereka

butuhkan tentang pemerintahan. Disamping itu untuk mewujudkan *good governance* yang baik juga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar ahli di bidangnya. Namun fakta di lapangan masih banyak orang-orang yang berada disuatu bidang yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Tentu saja kualitas dari suatu pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Minimnya pelatihan juga memperparah keadaan ini.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Pemerintah

bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPI yang memadai. Tanggungjawab tersebut harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SPI yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Tahun 2004, hanya beberapa daerah saja di Sumatera Barat yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu sebesar 7 persen, Tahun berikutnya menjadi 5 persen, kemudian pada Tahun 2006 dan 2007 masing-masing hanya tinggal 1 persen. Sebaliknya, laporan keuangan dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) justru meningkat, 2 persen pada Tahun 2004 menjadi 17 persen pada Tahun 2007. Persentase LKPD yang mendapat opini Tidak Wajar (TW) yang merupakan nilai terendah, juga naik dari 4 persen menjadi 19 persen. LKPP dan LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum terdapat kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pada Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), untuk dalam empat tahun terakhir (tahun 2004-2007), LKPP secara terus menerus

mendapat opini “Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)” sementara kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga belum meningkat dengan signifikan. Opini *Disclaimer* terhadap LKPP itu antara lain disebabkan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, belum tertibnya penempatan uang negara, serta tidak adanya investarisasi aset, utang, dan piutang negara. Selain itu, pembatasan akses atas penerimaan, piutang pajak dan biaya perkara pada Mahkamah Agung, sistem teknologi informasi yang kurang andal, sistem pengendalian internal yang lemah serta masih adanya penerimaan dan pengeluaran di luar mekanisme APBN. (sumber: Chandra dalam www.kabarindonesia.com, 15 November 2010).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 BPK menemukan 26 item kegiatan yang memboroskan uang negara, di antaranya belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan yang memboroskan keuangan negara Rp 38,7 milyar dan belum dipertanggungjawabkan. Terdapat tujuh pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal senilai Rp 8,260 milyar yang dilakukan melalui penunjukan langsung, dan terdapat biaya jasa listrik, air dan telepon di Dinas Pendidikan Sumatera Barat lebih tinggi dari pemakaian sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 481,39 juta (sumber: *Tempo Interaktif* 17 Juli 2008).

Di Sumatera Barat sendiri, untuk saat ini hanya Kabupaten Padang Pariaman saja yang baru mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang sebelumnya mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini berarti

Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mewujudkan *good governance* dan *clean governance* sepanjang Tahun 2008. Pada Tahun 2006 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat umumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bahkan tiga di antaranya Kabupaten/Kota memperoleh opini *Disclaimer* yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Solok Selatan, pada tahun 2007 daerah yang memperoleh opini *Disclaimer* meningkat menjadi 5 daerah, salah satunya untuk hasil audit tahun 2007 ini BPK memberikan opini *Disclaimer* (Menolak Memberikan Pendapat) untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Tetapi untuk Tahun Anggaran (TA) 2008 Kota Pariaman mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Begitu juga dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Dan Kabupaten Agam mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan untuk Kabupaten Solok Selatan BPK masih memberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 dan TA 2009 Kota Pariaman, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun lalu. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya opini WDP antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

daerah terutama SDM yang bertugas di Bagian Keuangan, hal ini juga menjadi penyebab menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah.

Adapun penelitian mengenai pengaruh penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan Ratih (2009), yang melakukan penelitian terhadap 60 orang responden pada SKPD di Kota Padang, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. penelitian yang dilakukan oleh Siska (2009) melakukan penelitian terhadap para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga hasilnya menunjukkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemerintahan yang baik dan sistem pengendalian intern di Kota Pariaman yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Sejauhmana penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Pariaman?
2. Sejauhmana penerapan *good governance* pada Pemerintah Kota Pariaman?

3. Sejauhmana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?
4. Sejauhmana pengaruh penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman?
5. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah Kota Pariaman dalam menerapkan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh penerapan *Good Governance* (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Sejauhmana pengaruh penerapan *Good Governance* (GG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman?
2. Sejauhmana pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang;

1. Pengaruh penerapan *Good Governance* (GG) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.
2. Pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademika.
3. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teoritis

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk laporan akuntansi yang menyajikan informasi tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah inti ekonomi setelah dicatat, diringkaskan dan disiapkan dalam bentuk sebuah laporan yang digunakan untuk mengambil keputusan bagi penggunanya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 dalam Harahap (2007:121), Tujuan Laporan Keuangan adalah:

- 1) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- 4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
- 5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- 6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:56)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputu-

san dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1) Laporan realisasi anggaran;

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2) Neraca;

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan arus kas;

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Catatan atas laporan keuangan

d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2004 dalam Harahap (2003:126), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Dapat Dipahami

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi haruslah dipahami oleh pemakai dengan mudah. Pemakai laporan keuangan

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2) Relevan

Informasi yang memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi pada masa lalu sehingga keputusan ekonomi masa depan yang wajar dapat diperoleh.

3) Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat di andalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4) Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pe-

makai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan membantu pencapaian daya banding.

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi yang disajikan secara jujur dengan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau wajar, sangat berpengaruh bagi pemakai laporan keuangan.

b) Dapat Diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. *Agency Theory*

Menurut *Agency theory*, (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Rachmawati 2009) adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan pihak-pihak terkait yaitu principal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana prinsipal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal.

Dalam sektor publik, Prinsipal adalah Rakyat yang diwakili oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sedangkan Agen adalah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dimana DPR bertujuan untuk mensejahterakan rakyat sedangkan SKPD bisa untuk mempertahankan jabatannya. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari Laporan Keuangan yang dijadikan sebagai dasar pertanggung jawabannya terhadap publik.

Untuk menjamin agar para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melakukan yang terbaik bagi kepentingan rakyat maka berdasarkan teori keagenan, pemerintah harus menanggung biaya

keagenan berupa pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen, pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga dampak dari konflik keagenan tidak terjadi (Weston dan Bringham, 1990:2).

Menurut Ali, 2002 dalam Sabrina 2010, terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai Agen, SKPD bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam pemerintahan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

3. *Good Governance*

Secara umum *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tetapi meskipun istilah *good governance* sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka diperlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Salam (2004:225) menyatakan:

”*governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* memiliki hakekat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum”.

Dalam Mardiasmo (2002:17) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program (UNDP)* memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *UNDP* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah peme-

rataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Merujuk pada konsepsi tersebut, *good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama *good governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam penyelesaian berbagai persoalan publik.

Dalam konteks itu, mekanisme kontrol (*check and balance*) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku dan budaya kerjanya (Wiranto (2000) dalam Idriansyah).

Sementara itu *World Bank* Dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan definisi *good governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah:

”sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Dalam hal ini *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah, mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Kata baik di sini maksudnya mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan karakteristik dasar *good governance*.

Abdul (2002) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan oleh masyarakat, *implementasi financial audit* dan *value for money* audit serta peran auditor eksternal. Syakhroza (2003:17) menyatakan prinsip-prinsip *Good Governance* yang menjadi pondasi untuk membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, *value for money* (*economic, efficiency, effectiveness*), *responsibility* dan transparansi.

b. Karakteristik *Good Governance*

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *good governance* diawali oleh tawaran badan-badan internasional, namun cita *good governance* pada saat ini sudah menjadi bagian serius dalam

wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan.

Menurut Salam (2004:226) “*governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance*, yaitu: (1) Bentuk rezim politik, (2) Proses di mana otorisasi digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”.

Berdasarkan tiga dimensi di atas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu: (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme, akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok, kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).

Menurut *UNDP* dalam Mardiasmo (2002:18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1) Partisipasi (*Participation*)

- a) Mendorong semua warga Negara untuk menggunakan hak-haknya untuk menyampaikan baik secara langsung atau tidak, usulan dan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

- b) Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

2) Aturan Hukum (*Rule of Law*)

- a) Supermasi hukum: Setiap tindakan Negara harus dilandasi oleh hukum an bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimilikinya.
- b) Kepastian Hukum : disamping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c) Hukum yang responsif: hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.
- d) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif: upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/ penegak hukum yang memiliki integritas.
- e) Independensi peradilan: yakni prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3) Transparansi (*Transparency*)

- a) Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan

- b) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
- c) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

- a) Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- b) Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.
- c) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- d) Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
- e) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

a. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Dalam hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, pemerintah bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Berorientasi pada masyarakat yang lebih luas.

b. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

c. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

a) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

b) Adanya perbaikan yang berkelanjutan.

c) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

d) Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.

e) Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.

f) Berkurangnya biaya operasional pelayanan.

g) Prospek memperoleh standar ISO pelayanan.

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

b) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Berkurangnya kasus-kasus KKN

e. Bervisi Strategis (*Strategic Vision*)

- a) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai
- b) Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi
- c) Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan anggaran.

UNDP menjelaskan tata pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan semua.
- 2) Transparan dan bertanggungjawab.
- 3) Efektif dan adil pada masyarakat.
- 4) Menjamin adanya suplemasi hukum.
- 5) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada *consensus* masyarakat.
- 6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Asian Development Bank (ADB) melalui Krina menegaskan konsensus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability*, dan (4) *participation*. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi, namun paling tidak ada se-

jumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang mendasari *good governance*, salah satunya yaitu akuntabilitas yang dalam hal ini menyangkut untuk kepentingan publik.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik. semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good 'national' governance* maupun *good local governance*) yang handal yang tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Aren (2008:370) sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif:

1) Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk para investor, kreditur, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggungjawab baik hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

2) Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Pengendalian di dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk mendorong pemakai yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.

3) Ketaatan Pada Hukum dan Peraturan

Semua perusahaan publik harus mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dalam akuntansi, seperti undang-undang perlindungan lingkungan dan hak sipil,

sementara yang lainnya berkaitan dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Sedangkan dalam PP 60 No Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

- 2) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
- 3) Keandalan pelaporan keuangan.
- 4) Pengamanan aset negara.
- 5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Aren (2008:402) lima komponen Pengendalian Internal:

- 1) Lingkungan Pengendalian
Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.
- 2) Penilaian Risiko
Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.
- 3) Aktivitas Pengendalian
Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.
- 4) Informasi dan Komunikasi
Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas serta mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.

5) Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi seperti yang diharapkan, dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

2) Penegakan integritas dan nilai etika;

- a) Komitmen terhadap kompetensi;
- b) Kepemimpinan yang kondusif;
- c) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- d) Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- e) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- f) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- g) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

3) Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko;
- b) Analisis risiko.

4) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b) Pembinaan sumber daya manusia;
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d) Pengendalian fisik atas aset;
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f) Pemisahan fungsi;
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i) Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya;
- j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

5) Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- l) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- m) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

2. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelan-

jutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidi lainnya.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara *good governance* dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2009) mengenai Pengaruh Penerapan Good Governance (GG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Padang, dengan jumlah responden 60 orang pada SKPD di Kota Padang. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan.

Muhamad (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas laporan keuangan memiliki manfaat dalam menunjang tercapainya *Good Corporate Governance*. Penelitian ini dilakukan pada bagian Satuan Pengawasan Intern PT.PINDAD (PERSERO) di Bandung. Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan kuesioner yang disebarkan mendapatkan hasil perhitungan 78,33%, artinya laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat di dalam mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance*.

Ayomi (2008) melakukan penelitian yang menguji Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam penelitian Ayomi bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik antara manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Siska (2009) yang menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian Siska, populasi atau responden yang digunakan yaitu para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun secara silmutan (bersama-sama), tetapi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah masih lemah, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi sangat lemah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena penerapan *good governance* belum baik dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Penerapan Good Governance (GG) terhadap Kualitas Laporan keuangan

Menurut Salam (2004:225) menyatakan: “governance merupakan proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga public mengatasi masalah-masalah publik, mengelolakan sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam Konteks ini, good governance memiliki hakikat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum”.

Menurut Salam (2004:226) “governance merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi governance, yaitu : (1) Bentuk Rezim politik, (2) Proses dimana otorisasi digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”.

Asian Development Bank (ADB) melalui Krina menegaskan Konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh empat pilar yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predicibility, dan (4) participation. jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi, namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang

dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, salah satunya akuntabilitas yang dalam hal ini kepentingan publik. Hal tersebut mempertegas *good governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena ke empat komponen tersebut harus dimiliki dalam penciptaan kehandalan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Muhammad (2008) menyimpulkan bahwa *good governace* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagitumbuhnya aktivitas usaha.

Jadi jika dikaitkan penerapan *good governance* dengan kualitas laporan keuangan, maka semakin baik penerapan *good governance* dalam suatu etitas pelaporan akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip dari *good governance* akan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih kolusi, korupsi, dan nepotisme dimana ini merupakan tujuan dari *good governance*, dan kualitas laporan keuangan menjadi baik dengan adanya penerpan *good governance*.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governace* berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan kata lain semakin baik penerapan *good governace*

dalam suatu entitas pelaporan akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Siska (2009) yang menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penelitian tersebut Siska menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian intern pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan kata lain semakin baik penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, penerapan *good governance* haruslah baik, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai di pemerintahan Kota Pariaman.

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Selain itu dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dengan baik maka perlu juga dipertimbangkan suatu asumsi bahwa pelaporan yang baik terwujud dari SDM yang baik.

Oleh Karena itu, perlu penekanan pada penguatan kapasitas para pemangku kepentingan. Terdapat tiga faktor untuk pencapaian penyusunan kualitas laporan keuangan yang baik, yakni SDM (*human factor*), lembaga (*institutions*) dan budaya (*cultures*). Namun, yang harus menjadi prioritas, maka faktor SDM lah yang harus lebih dulu dibenahi. Dengan kualitas SDM

yang baik dalam pelaporan keuangan, maka otomatis akan terbangun lembaga yang kuat dan budaya yang sehat atau bersih. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dapat diwujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga *good governance* dapat dicapai.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dengan pelaksanaan prinsip-prinsip dari *good governance* akan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di mana ini merupakan tujuan dari *good governance*, dan kualitas laporan keuangan menjadi baik dengan adanya penerapan *good governance*.

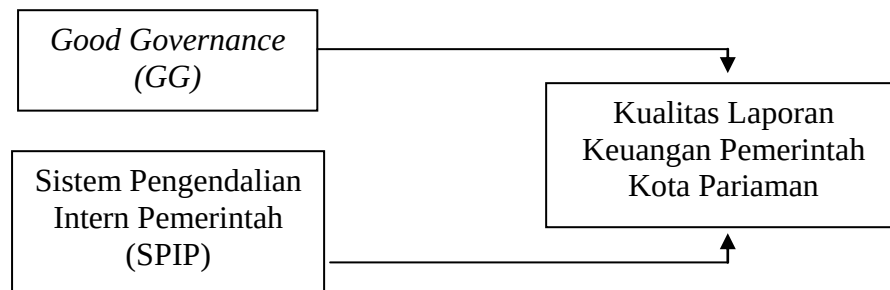
Salah satu prinsip dasar *good governance* yang mendukung kualitas laporan keuangan yaitu akuntabilitas dan aturan hukum. Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Sedangkan dalam aturan hukum, juga mengisyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur dengan jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat tentang kualitas laporan keuangan. Jika, dikaitkan penerapan *good governance*

dengan kualitas laporan keuangan, maka semakin baik penerapan *good governance* dalam suatu entitas pelaporan akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Jadi apabila pelaksanaan *good governance* tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat sendiri.

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah adalah penilaian resiko dan informasi dan komunikasi.

Dalam penilaian resiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasikan dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik pula kualitas penyajian laporan keuangan yang didapatkan. Berdasarkan

uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan *Good Governance (GG)* berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

H₂ : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman.
2. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman. Di mana semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas dari hasil laporan keuangan .

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya harus lebih responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga

pelaksanaan *good governance* dapat tercapai dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

2. Penelitian ini masih terbatas pada penerapan *good governance* dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu di mana staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membuat laporan keuangan SKPD, namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.